



***RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
2022***



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TAHUN 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat Rahmat, Taufik dan Hidayat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Renja Perangkat Daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga penyusunannya telah berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan lainnya, yaitu RPJP, RPMJD, Renstra PD dan RKPD.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan dokumen Renja ini agar dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas dukungan dan sumbangsuhnya sehingga Renja ini dapat tersusun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, semoga bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Malili, Juni 2021  
Kepala Satpol PP

**INDRA FAWZY, S.IP, M.Si**  
Pangkat: Pembina Tk. I  
NIP. 19701103 199003 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>6</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur .....	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur .....	16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	20
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	34
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>35</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	35
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur .....	35
3.3. Program dan Kegiatan .....	36
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut Satpol PP, sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Renja Satpol PP Tahun 2022.

Renja Satpol PP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Renja Satpol PP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satpol PP ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan Perundang-Undangan yang melandasi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
  19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
  20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor     Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Satpol PP Kabupaten Luwu Timur ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun Tujuan penyusunan Renja Satpol PP Kab Luwu Timur Tahun 2022 adalah:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Mengoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun;
3. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun;
4. Tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.;
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Satpol PP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disusun sesuai dengan sistematika penulisan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yaitu:

## **BAB. I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB. III TUJUAN DAN SASARAN**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB. IV PENUTUP**

- 4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja
- 4.2. Kaidah Pelaksanaan

**BAB II****HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dan Capaian Renstra**

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan serta sejauhmana realisasi pencapaian target kinerja program/kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

Dalam rangka pencapaian sasaran serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Satpol PP Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2020 telah melaksanakan 11 program dan 40 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
06	Penyediaan jasa kebersihan kantor
07	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
08	Penyediaan Alat Tulis Kantor
09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12	Penyediaan Makanan dan Minuman
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
16	Penyediaan Bahan logistic kantor
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis
21	Monitoring dan evaluasi
22	Kunjungan Kerja Dalam Daerah

<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
12	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Persenjataan/Keamanan
<b>03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>
02	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
<b>05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
04	Penguatan Kapasitas Polisi Pamong Praja
<b>06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>
02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
06	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
<b>08</b>	<b>Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD
<b>16</b>	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal</b>
10	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat
11	Penyiapan Tenaga Pengamanan Asset dan Pejabat Pemerintah Daerah
12	Operasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
13	Penyiapan Tenaga Pengamanan dan Pengawalan
<b>22</b>	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>
05	Kesiapsiagaan Satlinmas dalam penanggulangan bencana
<b>38</b>	<b>Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>
04	Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok
06	Penindakan Non-Yustisial Pelanggaran Peraturan Daerah
07	Penindakan Yustisial Pelanggaran Peraturan Daerah
08	Kerjasama Pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal

09	Pembinaan Kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
11	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
<b>44</b>	<b>Program Pencegahan, Kesiapsiagaan</b>
01	Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran
03	Penyuluhan, penyebaran informasi dan peringatan bahaya kebakaran
08	Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran
12	Pemenuhan Ketersediaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran
<b>49</b>	<b>Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat</b>
02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kapasitas Satlinmas

Untuk melihat hasil pelaksanaan Renja Tahun 2020 berikut disajikan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Satpol PP Kabupaten Luwu Timur pada Tabel. T-C.29

**Tabel T-C.29**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan  
Pencapaian Renstra Satpol PP s/d Tahun 2021  
Kabupaten Luwu Timur**

**Satuan Polisi Pamong Praja**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Satpol PP Tahun 2020	Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)		100						
	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	<b>Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagendakan (surat)</b>		<b>2390</b>	<b>1000</b>	<b>1077</b>	<b>107.70</b>			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi sda dan listrik terbayarkan (rekening)		11	270	267	98.88			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor (Orang)		1	1	1	100.00			
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki (Unit)		83	53	53	100.00			
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan (Jenis)		30	31	32	96.87			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)		3	4	4	100.00			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Satpol PP Tahun 2020	Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (Jenis)		14	13	13	100.00			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Eksemplar)		60	60	60	100.00			
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Jenis bahan bakar minyak/gas yang disediakan (Jenis)		1	2	2	100.00			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (Kotak)		700	640	635	99.21			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti (Kali)		89	41	41	100.00			
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis yang dibayarkan (Orang)		263	367	367	100.00			
	Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun (Dokumen)		4	4	4	100.00			
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (Kali)		90	348	346	100			
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%)</b>								
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)		5	19	19	100.00			



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Satpol PP Tahun 2020	Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)		5	2	2	100.00			
				2						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (Unit)		31	39	39	100.00			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	Jumlah alat-alat persenjataan/keamanan yang dipelihara (Unit)		5	5	0	0			
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan disiplin aparaturnya (%)</b>								
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan (Paket)		2	3	3	100.00			
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya (%)</b>								
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek/Pelatihan pengembangan aparaturnya (Kegiatan)		10	4	4	100.00			
	Penguatan Kapasitas Polisi Pamong Praja	Jumlah pelatihan kepomongprajaan yang dilaksanakan (Kegiatan)		5	2	2	100.00			
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)</b>								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Satpol PP Tahun 2020	Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan Akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (Dokumen)		2	2	2	100.00			
	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Dokumen)		1	1	1	100.00			
	<b>Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu (%)</b>								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang disusun (Dokumen)		4	6	8	133.33			
	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat (%)</b>								
	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Persentase Patroli Wilayah yang ditindaklanjuti (%)		35.60	35.00	35.84	102.40			
	Penyiapan Tenaga Pengamanan asset dan pejabat pemerintah daerah	Persentase pengamanan terhadap dan pejabat pemerintah daerah (%)		100.00	100.00	100.00	100			
	Operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (%)		98.15	100.00	100.00	100.00			
	Penyiapan tenaga pengamanan dan pengawalan	Persentase Pengamanan dan Pengawalan kegiatan KDH, Wakil KDH, Tamu VVIP, VIP, Pejabat Negara dan Tamu Daerah yang dilakukan (%)		100.00	100.00	100.00	100.00			
	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	<b>Cakupan Pelayanan Deteksi Dini dan Penanggulangan Bencana</b>								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Satpol PP Tahun 2020	Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kesiapsiagaan Satlinmas dalam penanggulangan bencana	Persentase keterlibatan Satlinmas dalam penanggulangan Bencana (%)		100.00	100.00	100.00	100.00			
	<b>Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>cakupan penegakan perda dan perkada (%)</b>								
	Pengawasan kawasan tanpa rokok	Persentase pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (%)		71.44	57.14	57.14	100.00			
	Penindakan Non-yustisial Pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan melalui tindakan Non-Yustisi (%)		<b>63.32</b>	<b>50.00</b>	<b>65,38</b>	130.76			
	Penindakan yustisial pelanggaran peraturan daerah	terlaksananya penegakan perda melalui tindakan yustisi (%)		15.35	36.00	19.23	53.41			
	Kerjasama pengawasan barang kena cukai ilegal	Frekuensi pelaksanaan pengawasan barang kena cukai ilegal (rokok) (Kali)		21	16	16	100.00			
	Pembinaan kesekretariatan PPNS	Persentase penyediaan penunjang kebutuhan administrasi Sekretariat PPNS (%)		100.00	100.00	100.00	100.00			
	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah regulasi yang disusun (Regulasi)			2	2	100.00			
	<b>Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (%)</b>								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Satpol PP Tahun 2020	Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kapasitas Satlinmas	jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas Satlinmas (Dokumen)		2	2	2	100.00			

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur**

Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten Luwu Timur yang menyelenggarakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam hal penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Luwu Timur. Satpol PP Kabupaten Luwu Timur menerapkan standar dan tolok ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal.

Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan beberapa peraturan pelaksanaannya, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satpol PP ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kerjanya sebagaimana dapat dilihat di dalam pada Tabel T-C.30.



Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase penegakan perda			84,44%	90%	86%	86%	78.43%	84,61%	94%		
2	Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan							40	22			
3	Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh satpol pp							51	26			
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketenteramandan keindahan)			65%	68%	71%	75%	100%	100%			
5	Jumlah gangguan K3 yang ditangani			41	450	440	448	450	448	448		
6	Jumlah penanganan unjuk rasa			-	-	-	5	-	-	5		
7	Jumlah patrol wilayah			1095	-	-	4015	1250	1250	4015		
8	Jumlah gangguan K3 yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh Satpol PP			63	55	60		450	448			
9	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat			12	13	15	15	12,7	9.13	9.13		



Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdiri atas penanganan gangguan ketenteraman ketertiban dan keindahan, penyelesaian penegakan peraturan daerah, keterlibatan satlinmas dalam penanggulangan bencana. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP  
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda	63.60 %	70%	83.6%	84%	85%	86%	86%	86%
2.	Persentase penanganan gangguan K3	59.09 %	62.00%	62.11%	65.00%	68.00%	71.00%	75.00%	75.00%

Sedangkan untuk Indikator Kinerja kunci Satuan Polisi Pamong Praja yang disusun berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Indikator Kinerja Kunci (IKK)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

No	Indikator Kinerja Kunci (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	8,37	10,00	11,00	12,00	13,00	15,00	15,00	15,00
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	59,09%	61,82%	63,33%	65,08%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penegakan PERDA	70,00%	82,35%	82,93%	84,44%	90,00%	94,00%	94,00%	94,00%

Untuk target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Standar Pelayanan Minimal  
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

No	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	1. Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan siaga patroli ketenteraman dan ketertiban umum						
			Cakupan rasio perlindungan masyarakat (linmas)						
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota						

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur**

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian kinerja Renstra SKPD, dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP adalah

- 1) Keterbasan kompetensi pegawai yang ada (PNS dan Upah Jasa),
- 2) Terbatasnya sarana prasarana
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum dan ketaatan terhadap peraturan daerah.
- 4) Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur masih dilakukan secara parsial karena belum adanya sistem koordinasi yang baik antar stakeholder penegakan peraturan daerah yang memungkinkan penegakan perda terlaksana secara efektif.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kabupaten Luwu Timur yang terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non-yustisial dan pro-yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda.

Berkaca pada permasalahan yang ada, direkomendasikan bahwa:

- 1) Guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan, penyelenggaraan ketertiban, dan penegakan peraturan daerah maka akan diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kemampuan personil Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu menangani gangguan Ketertiban, ketenteraman dan keindahan, menyelesaikan pelanggaran perda/perkada
- 3) Dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak diantaranya Polri/TNI, OPD Pengampu

Peraturan Daerah, para aparat di tingkat kecamatan desa/kelurahan hingga RT dan Dusun.

4) Penambahan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja .

Isu-isu penting lain pada Tahun 2021 yang perlu perhatian adalah Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi Dinas tersendiri berpisah dengan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Perubahan Kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka dibutuhkan anggaran khusus untuk penyiapan Sarana dan Prasarana Dinas baru mulai dari penyiapan Gedung Kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, serta penunjang urusan lainnya.

Terkait dengan Pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan akan berakhir dan kemungkinan akan berlanjut ke Tahun 2021, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai garda terdepan dalam mengawal penerapan disiplin dan penegakan sanksi bagi pelanggar Protokol Kesehatan. Sehingga dibutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar dalam mendukung operasional Anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait Penerapan Disiplin dan Penegakan Sanksi. Hal ini dilakukan agar disiplin warga meningkat dalam menerapkan 3M (Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan) dan ujungnya dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok ukur/target sasaran program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan SKPD.

Rancangan awal RKPD Tahun 2021 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan



dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Satpol PP . Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31

**Tabel T-C.31**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	LUWU TIMUR	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	12,118,006,217	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	LUWU TIMUR	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	12,118,006,217	
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LUWU TIMUR	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	17 dokumen	234,500,000	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LUWU TIMUR	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	17 dokumen	234,500,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	LUWU TIMUR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2 dokumen	52,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	LUWU TIMUR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2 dokumen	52,500,000	



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	1 dokumen	5,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	1 dokumen	5,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	1 dokumen	5,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	1 dokumen	5,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun (Dokumen)	1 dokumen	5,500,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	1 dokumen	5,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	1 dokumen	5,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	1 dokumen	5,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)	3 dokumen	55,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)	3 dokumen	55,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LUWU TIMUR	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	8 dokumen	105,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LUWU TIMUR	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	8 dokumen	105,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	LUWU TIMUR	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)		8,099,006,217	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	LUWU TIMUR	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)		8,099,006,217	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LUWU TIMUR	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	42 orang	7,946,390,217	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LUWU TIMUR	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	42 orang	7,946,390,217	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	LUWU TIMUR		4 orang	77,616,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	LUWU TIMUR		4 orang	77,616,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	LUWU TIMUR		12 dokumen	5,500,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	LUWU TIMUR	jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun	12 dokumen	5,500,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	LUWU TIMUR	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun (Dokumen)	4 dokumen	5,500,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	LUWU TIMUR	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun (Dokumen)	4 dokumen	5,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	LUWU TIMUR	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun (Dokumen)	1 dokumen	31,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	LUWU TIMUR	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun (Dokumen)	1 dokumen	31,000,000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	LUWU TIMUR		2 dokumen	5,500,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	LUWU TIMUR	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	2 dokumen	5,500,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LUWU TIMUR	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)	12 dokumen	22,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LUWU TIMUR	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)	12 dokumen	22,000,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	LUWU TIMUR	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun (Dokumen)	1 dokumen	5,500,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	LUWU TIMUR	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun (Dokumen)	1 dokumen	5,500,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	LUWU TIMUR	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)		55,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	LUWU TIMUR	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)		55,000,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	LUWU TIMUR	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (Dokumen)	2 dokumen	5,500,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	LUWU TIMUR	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (Dokumen)	2 dokumen	5,500,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<b>LUWU TIMUR</b>	Persentase barang milik daerah SKPD yang diamankan (%)	100%	5,500,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<b>LUWU TIMUR</b>	Persentase barang milik daerah SKPD yang diamankan (%)	100%	5,500,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	1 dokumen	16,500,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	1 dokumen	16,500,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	12 dokumen	22,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	12 dokumen	22,000,000	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dimanfaatkan	85%	5,500,000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dimanfaatkan	85%	5,500,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>LUWU TIMUR</b>	<b>Persentase Pegawai PD yang dilayani ('%)</b>		846,500,000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>LUWU TIMUR</b>	<b>Persentase Pegawai PD yang dilayani ('%)</b>		846,500,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (Paket)	266 orang	255,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (Paket)	266 orang	255,000,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	4 dokumen	16,500,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	4 dokumen	16,500,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (Dokumen)		55,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (Dokumen)		55,000,000	



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)	25 orang	400,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)	25 orang	400,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang tersosialisasi kepada ASN	4 regulasi	20,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang tersosialisasi kepada ASN	4 regulasi	20,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	5 orang	100,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	5 orang	100,000,000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>LUWU TIMUR</b>	<b>Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)</b>		653,000,000	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>LUWU TIMUR</b>	<b>Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)</b>		653,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	200 buah	25,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	200 buah	25,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)	169 buah	25,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)	169 buah	25,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	11 jenis	12,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	11 jenis	12,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan (jenis)	10 jenis	24,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan (jenis)	10 jenis	24,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)	5 jenis	21,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)	5 jenis	21,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	LUWU TIMUR	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	100 orang	21,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	LUWU TIMUR	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	100 orang	21,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LUWU TIMUR	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	351 kali	525,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LUWU TIMUR	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	351 kali	525,000,000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	LUWU TIMUR	<b>Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)</b>		1,290,000,000	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	LUWU TIMUR	<b>Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)</b>		1,290,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	LUWU TIMUR	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Unit)	3 unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	LUWU TIMUR	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Unit)	3 unit	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	LUWU TIMUR	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	10 unit	75,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	LUWU TIMUR	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	10 unit	75,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	LUWU TIMUR	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	20 unit	275,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	LUWU TIMUR	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	20 unit	275,000,000	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	LUWU TIMUR	Jumlah pengadaan aset tak berwujud (Unit)		15,000,000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	LUWU TIMUR	Jumlah pengadaan aset tak berwujud (Unit)		15,000,000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	LUWU TIMUR	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	3 unit	750,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	LUWU TIMUR	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	3 unit	750,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	LUWU TIMUR	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)		25,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	LUWU TIMUR	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)		25,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	LUWU TIMUR	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	1 paket	150,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	LUWU TIMUR	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	1 paket	150,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	LUWU TIMUR	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (%)		270,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	LUWU TIMUR	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (%)		270,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	LUWU TIMUR	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	100%	15,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	LUWU TIMUR	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	100%	15,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	LUWU TIMUR	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	36 rekening	210,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	LUWU TIMUR	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	36 rekening	210,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LUWU TIMUR	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (Orang)	2 orang	45,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LUWU TIMUR	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (Orang)	2 orang	45,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>LUWU TIMUR</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)</b>		670,000,000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>LUWU TIMUR</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)</b>		670,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>LUWU TIMUR</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	35,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>LUWU TIMUR</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	35,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	30 unit	431,750,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	30 unit	431,750,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	LUWU TIMUR	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	100 unit	65,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	LUWU TIMUR	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	100 unit	65,000,000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	LUWU TIMUR	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 unit	50,000,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	LUWU TIMUR	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 unit	50,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	LUWU TIMUR	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	2 unit	55,750,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	LUWU TIMUR	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	2 unit	55,750,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	LUWU TIMUR	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	7 jenis	32,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	LUWU TIMUR	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	7 jenis	32,500,000	
	<b>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	LUWU TIMUR	<b>Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada tahun berjalan (kasus)</b>		9,700,489,250	<b>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	LUWU TIMUR	<b>Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada tahun berjalan (kasus)</b>		9,700,489,250	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	LUWU TIMUR	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani (Persen)	100%	8,760,230,000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	LUWU TIMUR	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani (Persen)	100%	8,760,230,000	
			Persentase Desa/Kelurahan dengan Satlinmas Aktif (Persen)				LUWU TIMUR	Persentase Desa/Kelurahan dengan Satlinmas Aktif (Persen)			
			Persentase standar teknis dan mutu SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terpenuhi (Persen)				LUWU TIMUR	Persentase standar teknis dan mutu SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terpenuhi (Persen)			
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	LUWU TIMUR	Jumlah Patroli siaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum (kali)	100%	6,306,056,250	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	LUWU TIMUR	Jumlah Patroli siaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum (kali)	100%	6,306,056,250	



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani (gangguan)	100%	147,000,000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani (gangguan)	100%	147,000,000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah rapat Koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan yang dilaksanakan (kali)	44 kali	144,115,000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah rapat Koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan yang dilaksanakan (kali)	44 kali	144,115,000	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah Desa/Kelurahan dengan Satlinmas aktif	127 satuan	187,803,000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah Desa/Kelurahan dengan Satlinmas aktif	127 satuan	187,803,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ketentraman dan Ketertiban Umum		(desa/kelurahan)			Ketentraman dan Ketertiban Umum		(desa/kelurahan)			
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah Aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)	266 orang	678,480,000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah Aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)	266 orang	678,480,000	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah kerjasama (MoU) Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan (dokumen)	4 kali	22,385,000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah kerjasama (MoU) Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan (dokumen)	4 kali	22,385,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah sarana dan prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai standar mutu SPM (jenis)		1,437,500,000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah sarana dan prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai standar mutu SPM (jenis)		1,437,500,000	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah SOP penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun/dimutakhirkan (dokumen)	20 SOP	40,000,000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah SOP penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun/dimutakhirkan (dokumen)	20 SOP	40,000,000	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (persen (%))	100%	15,000,000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	<b>LUWU TIMUR</b>	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (persen (%))	100%	15,000,000	
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>LUWU TIMUR</b>	<b>Persentase Penegakan PERDA (Persen)</b>	50%	496,400,000	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>LUWU TIMUR</b>	<b>Persentase Penegakan PERDA (Persen)</b>	50%	496,400,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	LUWU TIMUR	Jumlah Perda/Perkada memuat sanksi yang disosialisasikan (perda/perkada)	10 perda/ perkada	73,700,000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	LUWU TIMUR	Jumlah Perda/Perkada memuat sanksi yang disosialisasikan (perda/perkada)	10 perda/ perkada	73,700,000	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	LUWU TIMUR	Jumlah Perda/Pekada yang memuat sanksi yang diawasi (perda/perkada)	5 perda/ perkada	172,700,000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	LUWU TIMUR	Jumlah Perda/Pekada yang memuat sanksi yang diawasi (perda/perkada)	5 perda/ perkada	172,700,000	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	LUWU TIMUR	Jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani (kasus)	100%	250,000,000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	LUWU TIMUR	Jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani (kasus)	100%	250,000,000	
	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	LUWU TIMUR	<b>Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani dengan baik oleh PPNS (Persen)</b>	100%	225,750,000	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	LUWU TIMUR	<b>Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani dengan baik oleh PPNS (Persen)</b>	100%	225,750,000	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	LUWU TIMUR	Jumlah PPNS yang dikembangkan	7 orang	225,750,000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	LUWU TIMUR	Jumlah PPNS yang dikembangkan	7 orang	225,750,000	

**RENCANA KERJA  
TAHUN 2022**



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			kapasitas dan kariernya (orang)					kapasitas dan kariernya (orang)			
		TOTAL					TOTAL				

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Bagian ini merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di wilayah kecamatan. Dari hasil penjangkauan aspirasi masyarakat di forum musrenbang ini tidak terdapat usulan kegiatan baru yang diusulkan oleh masyarakat. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 mengusung tema “Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural”.

Pada RKP 2022 memuat tujuh prioritas nasional yang salah satunya berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Prioritas ke tujuh “Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik”.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Luwu Timur, Satpol PP menetapkan tujuan:

**“Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif”**

Adapun Sasaran Satpol PP Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal
- 2) Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan Perangkat Daerah.

Penentuan jenis program disesuaikan dengan nama program yang telah ditetapkan dalam Nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyangkut kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :
  - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - Penyusunan Dokumen perencanaan
    - Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD
    - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2 Administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
    - Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN
    - Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD
    - Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD
    - Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
    - Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/semester
  - 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
    - rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
    - Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD
  - 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

- Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
  - Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
  - Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi
  - sosialisasi peraturan perundang-undangan
  - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 1.5 Administrasi Umum perangkat Daerah
- penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
  - penyediaan peralatan rumah tangga
  - Penyediaan bahan logistik kantor
  - penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Fasilitasi kunjungan tamu
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
  - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Keegiatannya sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Keegiatannya sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kegiatannya sebagai berikut :
- 1.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota.. Sub kegiatannya sebagai Berikut :
- Pencegahan Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
  - Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
  - Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
  - Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum
  - Peningkatan Kapasitas SDM satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia.
  - Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
  - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum
  - Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
  - Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- 2.2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, Sub Kegiatannya sebagai berikut :
- Sosialisasi Penegakan daerah dan Peraturan Bupati/walikota
  - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

- Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota
- 2.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupten/Kota, Sub kegiatannya sebagai berikut ;
- Pengembangan kapasitas dan karier PPNS

#### **BAB IV**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan Perangkat Daerah.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 secara detail dapat dilihat pada Tabel T-C.33 berikut ini:



**Tabel T-C.33**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022  
dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Kabupaten Luwu Timur**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X XX 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	LUWU TIMUR	100%	6,422,678,678	LUWU TIMUR		0	7,064,946,546
X. XX. 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	LUWU TIMUR	17 dokumen	114,783,705	LUWU TIMUR		17 dokumen	126,262,076
X. XX. 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	LUWU TIMUR	2 dokumen	29,783,705	LUWU TIMUR		2 dokumen	32,762,076



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X. XX. 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	LUWU TIMUR	1 dokumen	2,500,000	LUWU TIMUR		1 dokumen	2,750,000
X. XX. 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	LUWU TIMUR	1 dokumen	2,500,000	LUWU TIMUR		1 dokumen	2,750,000
X. XX. 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun (Dokumen)	LUWU TIMUR	1 dokumen	2,500,000	LUWU TIMUR		1 dokumen	2,750,000
X. XX. 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	LUWU TIMUR	1 dokumen	2,500,000	LUWU TIMUR		1 dokumen	2,750,000
X. XX. 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)	LUWU TIMUR	3 dokumen	25,000,000	LUWU TIMUR		3 dokumem	27,500,000
X. XX. 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	LUWU TIMUR	8 dokumen	50,000,000	LUWU TIMUR		8 dokumen	55,000,000
X. XX. 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan</b>	LUWU TIMUR		4,821,072,657	LUWU TIMUR			5,303,179,923



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		<b>dengan baik</b> (%)							
X. XX. 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	<b>LUWU TIMUR</b>	42 orang	4,749,112,657	<b>LUWU TIMUR</b>		42 orang	5,224,023,923
X. XX. 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Honorariumnya	<b>LUWU TIMUR</b>	4 orang	36,960,000	<b>LUWU TIMUR</b>		4 orang	40,656,000
X. XX. 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	<b>LUWU TIMUR</b>	12 dokumen	19,463,800	<b>LUWU TIMUR</b>		0 dokumen	0
X. XX. 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun (Dokumen)	<b>LUWU TIMUR</b>	4 dokumen	2,500,000	<b>LUWU TIMUR</b>		4 dokumen	2,750,000
X. XX. 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)	<b>LUWU TIMUR</b>	1 dokumen	15,000,000	<b>LUWU TIMUR</b>		1 dokumen	16,500,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X. XX. 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan tanggapan pemeriksaan yang disusun tepat waktu	LUWU TIMUR	2 dokumen	2,500,000	LUWU TIMUR		2 dokumen	2,750,000
X. XX. 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/se mesteran SKPD yang disusun (Dokumen)	LUWU TIMUR	12 dokumen	10,000,000	LUWU TIMUR		0 jenis	11,000,000
X. XX. 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun (Dokumen)	LUWU TIMUR	1 dokumen	2,500,000	LUWU TIMUR		1 dokumen	2,750,000
X. XX. 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)</b>	LUWU TIMUR		26,650,000	LUWU TIMUR			29,315,000
X. XX. 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (Dokumen)	LUWU TIMUR	2 dokumen	2,500,000	LUWU TIMUR		2 dokumen	2,750,000
X. XX. 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase barang milik daerah SKPD yang diamankan (%)	LUWU TIMUR	100%	2,500,000	LUWU TIMUR		100%	2,750,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X. XX. 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	LUWU TIMUR	1 dokumen	7,500,000	LUWU TIMUR		1 dokumen	8,250,000
X. XX. 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	LUWU TIMUR	12 dokumen	11,650,000	LUWU TIMUR		12 dokumen	12,815,000
X. XX. 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dimanfaatkan	LUWU TIMUR	85%	2,500,000	LUWU TIMUR		85%	2,750,000
X. XX. 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)</b>	LUWU TIMUR		423,500,000	LUWU TIMUR			465,850,000
X. XX. 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (Paket)	LUWU TIMUR	266 orang	133,000,000	LUWU TIMUR		266 orang	146,300,000
X. XX. 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	LUWU TIMUR	4 dokumen	7,500,000	LUWU TIMUR		4 dokumen	8,250,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X. XX. 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (Dokumen)	LUWU TIMUR	100%	30,000,000	LUWU TIMUR		100%	33,000,000
X. XX. 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)	LUWU TIMUR	25 orang	193,000,000	LUWU TIMUR		25 orang	212,300,000
X. XX. 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang tersosialisasi kepada ASN	LUWU TIMUR	4 regulasi	10,000,000	LUWU TIMUR		4 regulasi	11,000,000
X. XX. 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	LUWU TIMUR	5 orang	50,000,000	LUWU TIMUR		5 orang	55,000,000
X. XX. 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)</b>	LUWU TIMUR		376,322,000	LUWU TIMUR			413,954,200
X. XX. 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	LUWU TIMUR	200 buah	10,000,000	LUWU TIMUR		200 buah	11,000,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X. XX. 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)	LUWU TIMUR	169 buah	10,048,000	LUWU TIMUR		169 buah	11,052,800
X. XX. 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	LUWU TIMUR	11 jenis	5,656,500	LUWU TIMUR		11 jenis	6,222,150
X. XX. 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan (jenis)	LUWU TIMUR	10 jenis	11,400,000	LUWU TIMUR		10 jenis	12,540,000
X. XX. 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)	LUWU TIMUR	5 jenis	10,000,000	LUWU TIMUR		5 jenis	11,000,000
X. XX. 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	LUWU TIMUR	100 orang	10,000,000	LUWU TIMUR		100 orang	11,000,000
X. XX. 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	LUWU TIMUR	351 kali	314,217,500	LUWU TIMUR		351 kali	345,639,250



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X. XX. 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)</b>	LUWU TIMUR		250,000,000	LUWU TIMUR		275,000,000	
X. XX. 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Unit)	LUWU TIMUR	3 unit	-	LUWU TIMUR		-	
X. XX. 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit))	LUWU TIMUR	10 unit	-	LUWU TIMUR		-	
X. XX. 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	LUWU TIMUR	20 unit	100,000,000	LUWU TIMUR		110,000,000	
X. XX. 01 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan aset tak berwujud (Unit)	LUWU TIMUR		-	LUWU TIMUR		-	
X. XX. 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	LUWU TIMUR	3 unit	-	LUWU TIMUR		-	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X. XX. 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	LUWU TIMUR			LUWU TIMUR			
X. XX. 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	LUWU TIMUR	1 paket	150,000,000	LUWU TIMUR	1 paket	165,000,000	
X. XX. 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (%)</b>	LUWU TIMUR		141,475,316	LUWU TIMUR		155,622,848	
X. XX. 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	LUWU TIMUR	100%	7,552,316	LUWU TIMUR		8,307,548	
X. XX. 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	LUWU TIMUR	36 rekening	103,923,000	LUWU TIMUR	36 rekening	114,315,300	
X. XX. 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (Orang)	LUWU TIMUR	2 orang	30,000,000	LUWU TIMUR	2 orang	33,000,000	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X. XX. 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)</b>	LUWU TIMUR		268,875,000	LUWU TIMUR		295,762,500	
X. XX. 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	LUWU TIMUR	1 unit	15,100,000	LUWU TIMUR	1 unit	16,610,000	
X. XX. 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	LUWU TIMUR	30 unit	120,000,000	LUWU TIMUR	30 unit	132,000,000	
X. XX. 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	LUWU TIMUR	100 unit	45,000,000	LUWU TIMUR	100 unit	49,500,000	
X. XX. 01 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	LUWU TIMUR	1 unit	50,000,000	LUWU TIMUR	1 unit	55,000,000	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X. XX. 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	LUWU TIMUR	2 unit	24,375,000	LUWU TIMUR		2 unit	26,812,500
X. XX. 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	LUWU TIMUR	7 jenis	14,400,000	LUWU TIMUR		7 jenis	15,840,000
1 05 02	<b>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada tahun berjalan (kasus)</b>	LUWU TIMUR		7,984,740,895	LUWU TIMUR			8,783,214,985
1. 05. 02 2.01	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani (Persen)</b>	LUWU TIMUR	100%	7,504,740,895	LUWU TIMUR		100%	8,255,214,985
		<b>Persentase Desa/Kelurahan dengan Satlinmas Aktif (Persen)</b>	LUWU TIMUR			LUWU TIMUR			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		<b>Persentase standar teknis dan mutu SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terpenuhi (Persen)</b>				LUWU TIMUR			
1. 05. 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Patroli siaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum (kali)	LUWU TIMUR	100%	5,624,740,895	LUWU TIMUR		100%	6,187,214,985
1. 05. 02 2.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani (gangguan)	LUWU TIMUR	100%	100,000,000	LUWU TIMUR		100%	110,000,000
1. 05. 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah rapat Koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan yang dilaksanakan (kali)	LUWU TIMUR	44 kali	50,000,000	LUWU TIMUR		44 kali	55,000,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1. 05. 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa/Kelurahan dengan Satlinmas aktif (desa/kelurahan)	LUWU TIMUR	127 satuan	150,000,000	LUWU TIMUR		127 satuan	165,000,000
1. 05. 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)	LUWU TIMUR	266 orang	250,000,000	LUWU TIMUR		266 orang	275,000,000
1. 05. 02 2.01 06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kerjasama (MoU) Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan (dokumen)	LUWU TIMUR	4 kali	50,000,000	LUWU TIMUR		4 kali	50,000,000
1. 05. 02 2.01 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai standar mutu SPM (jenis)	LUWU TIMUR		1,250,000,000	LUWU TIMUR			1,375,000,000
1. 05. 02 2.01 08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun/dimutakhirka	LUWU TIMUR	20 SOP	20,000,000	LUWU TIMUR		20 SOP	22,000,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		n (dokumen)							
1. 05. 02 2.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (persen (%))	<b>LUWU TIMUR</b>	100%	10,000,000	<b>LUWU TIMUR</b>		100%	11,000,000
1. 05. 02 2.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase Penegakan PERDA (Persen)</b>	<b>LUWU TIMUR</b>	50%	425,000,000	<b>LUWU TIMUR</b>		50%	467,500,000
1. 05. 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Perkada memuat sanksi yang disosialisasikan (perda/perkada)	<b>LUWU TIMUR</b>	10 perda/ perkada	75,000,000	<b>LUWU TIMUR</b>		10 perda/ perkada	82,500,000
1. 05. 02 2.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Pekada yang memuat sanksi yang diawasi (perda/perkada)	<b>LUWU TIMUR</b>	5 perda/ perkada	100,000,000	<b>LUWU TIMUR</b>		5 perda/ perkada	110,000,000
1. 05. 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<b>Jumlah</b> pelanggaran Peda/Perkada yang tertangani (kasus)	<b>LUWU TIMUR</b>	100%	250,000,000	<b>LUWU TIMUR</b>		100%	275,000,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1. 05. 02 2.03	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani dengan baik oleh PPNS (Persen)</b>	LUWU TIMUR	100%	55,000,000	LUWU TIMUR		100%	60,500,000
1. 05. 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang dikembangkan kapasitas dan kariernya (orang)	LUWU TIMUR	7 orang	55,000,000	LUWU TIMUR		7 orang	60,500,000
					<b>14,407,419,573</b>				

## **BAB V PENUTUP**

### **4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan sebagai implementasi dari Renstra SKPD Satpol PP Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja Satpol PP Tahun 2022 dilakukan dengan berupaya mewujudkan konsistensi antara dokumen renja SKPD disusun disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran dalam menunjang program kegiatan yang ada di Satpol PP .

Renja Satpol PP merupakan dokumen operasional yang memuat sejumlah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu tahun untuk berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022 melalui koordinasi/asistensi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai proses dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021. RKA yang telah disetujui oleh TAPD dan DPRD dalam pembahasan RAPBD akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP sebagai penjabaran dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

### **4.2. Kaidah Pelaksanaan**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021 wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif maka disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Renja Satpol PP Tahun 2022 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun program kerja Perangkat Daerah, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. Bagi Satpol PP Kabupaten Luwu Timur, Dokumen Renja ini merupakan gambaran dalam menyusun kebijakan berupa kerangka regulasi maupun

kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satpol PP Tahun 2022, dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program.

3. Pada Akhir Tahun anggaran 2022, Satpol PP wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan- peraturan lainnya.

Akhir kata semoga Renja Satpol PP Kabupaten Luwu Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Malili, Juni 2021

Kepala Satpol PP

**INDRA FAWZY, S.IP, M.Si**

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP. 19701103 199003 1 002